

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam perkembangannya keberadaan ibu kota Kabupaten Malang yang selama ini berada di wilayah Kota Malang dianggap kurang selaras dengan kebijakan Kabupaten Malang yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan stakeholders keberadaan ibu kota Kabupaten Malang yang saat ini berada di wilayah kota Malang dianggap sudah tidak sesuai dan perlu dipindahkan ke Kecamatan Kepanjen yang berada di wilayah Kabupaten Malang agar dapat sejalan dan mengikuti pertumbuhan pembangunan yang sedang giat dilakukan. Saat ini, Kabupaten Malang tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Pembangunan di Kabupaten Malang terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan perdagangan, jasa, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/ibu kota Kabupaten Malang (*Peraturan Pemerintah RI*, 2008).

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 menandakan resminya perpindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Kota Malang ke Kecamatan Kepanjen. Penetapan PP No. 18 2008 tersebut menjadikan Kepanjen sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai kota satelit penyangga utama Kota Malang, dan termasuk dalam kawasan metropolitan Malang Raya. Pemindahan ibukota Kabupaten Malang ini juga mempengaruhi transportasi dan pola ruang di Kecamatan Kepanjen akibat perubahan fungsi kawasan menjadi pusat pemerintahan (Pandika et al., 2015). Jumlah penduduk di Kecamatan Kepanjen mengalami sebanyak 113.391 pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,45% pertahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan jumlah pergerakan di Kecamatan Kepanjen semakin meningkat. Untuk jumlah kepemilikan kendaraan yang diperoleh dari Bapenda Kepanjen adalah 66.463 kendaraan dengan laju pertumbuhan dengan faktor pertumbuhan kendaraan di tahun sebelumnya 4% pertahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022

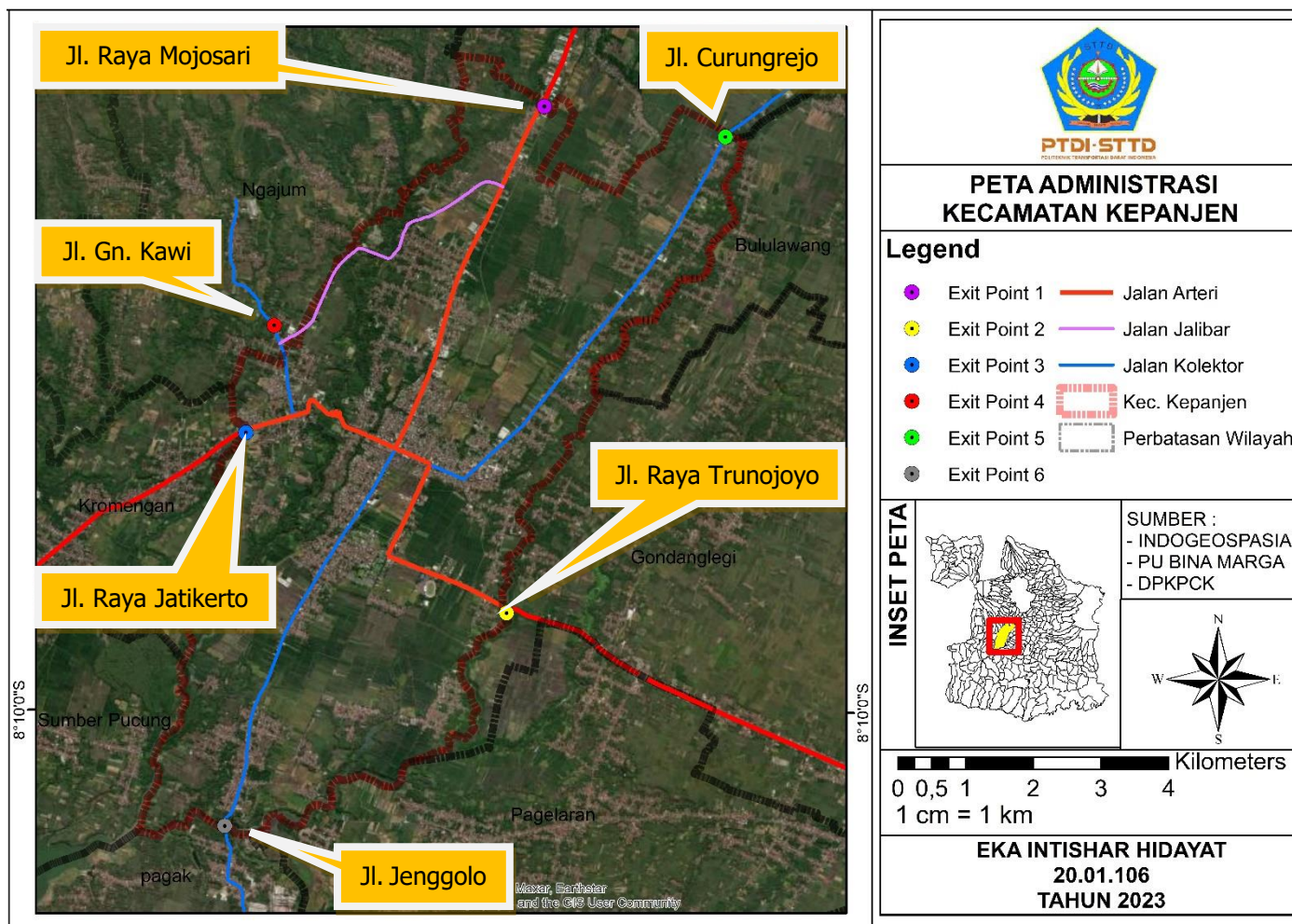
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang termasuk juga Kecamatan Kepanjen tumbuh sebesar 4,42%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,12% (BPS Kabupaten Malang, 2023). Dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kepanjen dalam mengarahkan Pembangunan, Kecamatan Kepanjen berganti nama menjadi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kepanjen (*Pemerintah Daerah Kabupaten Malang*, 2014). Berdasarkan RTRW Kabupaten Malang tahun 2010-2030, Kecamatan Kepanjen dijadikan sebagai pusat kegiatan lokal sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, dan pusat peribadatan, dan pusat perkantoran skala regional dan pusat olahraga dan seni skala regional-nasional (Fi et al., 2023).

Kepanjen merupakan kecamatan di Kabupaten Malang yang berada di sebelah selatan Kota Malang dan dilintasi jalur Malang – Blitar dan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan Kepanjen Kota kurang lebih berjarak 20 km di sebelah selatan Kota Malang. Secara astronomis Kecamatan Kepanjen terletak diantara 112,5497 sampai 112,6066 Bujur Timur dan 8,0916 sampai 8,1708 Lintang selatan. Seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Kepanjen adalah dataran dengan topografi seluruh desa tergolong dataran. Luas kawasan Kecamatan Kepanjen secara keseluruhan adalah sekitar 46,25 km² atau sekitar 1,55 persen dari total luas Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang topografi seluruh wilayahnya dataran, Kecamatan Kepanjen merupakan jalur transit yang menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Blitar serta jalur utara menuju Kota Malang dan Surabaya.

Secara geografis Kecamatan Kepanjen terletak di pusat wilayah Kabupaten Malang. Adapun batas administrasi Kecamatan Kepanjen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Ngajum;
Sebelah Selatan	: Kecamatan Pagak, Kecamatan Pagelaran;
Sebelah Barat	: Kecamatan Ngajum, kecamatan Kromengan;
Sebelah Timur	: Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi.

Kecamatan Kepanjen mempunyai luas keseluruhan 4.814,1 Ha. Secara administratif Kecamatan Kepanjen terbagi menjadi 18 kelurahan/desa yaitu 4 kelurahan dan 14 desa. Untuk luasan masing-masing desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kepanjen (BPS Kabupaten Malang, 2023).



Gambar 2.1 Peta administrasi Kecamatan Kepanjen

2.1 Kondisi Transportasi

Kecamatan Kepanjen, mengalami *trend* pertumbuhan kendaraan yang tinggi, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Sehingga Pemerintah saat ini terus berusaha keras bagaimana menyeimbangkan kepadatan lalu lintas angkutan daratnya sehingga tercipta kelancaran lalu lintas angkutan daratnya dengan tetap mampu mendorong dan meningkatkan perekonomiannya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dan perkembangan serta pembangunan ekonomi di Kecamatan Kepanjen seperti pembangunan hunian baik di tengah kota maupun di pinggiran secara langsung telah meningkatkan mobilitas barang, jasa, dan manusia. Untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan serta mobilitas tersebut, maka Pemerintah harus bekerja sama (berkoordinasi) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat membangun prasarana jalan, baik jalan tol, jalan lingkar, atau jalan layang. Memiliki perencanaan yang matang terkait transportasi darat serta melakukan rekayasa atau manajemen lalu lintas angkutan jalan (Priyambodo, 2017).

Arus lalu-lintas mencerminkan komposisi lalu-lintas di Kecamatan Kepanjen, dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp). Beberapa tipe kendaraan, seperti; 1). Tipe kendaraan MP terdiri dari kendaraan ringan (Mobil Pribadi, MPU, Bus Kecil, Pickup/Box, Truk Kecil); 2). Tipe kendaraan KS terdiri dari kendaraan berat menengah (Bus Sedang, Truk Sedang); 3). Tipe kendaraan BB terdiri dari kendaraan berat besar (Bus Besar); 4). Tipe kendaraan TB terdiri dari kendaraan berat besar (Truk tronton, truk semi *trailer*, truk gandeng); 5). Tipe kendaraan SM terdiri dari Sepeda motor; 6). Tipe kendaraan UM, yaitu Sepeda.

Transportasi di Kecamatan Kepanjen hanya terdapat transportasi darat yaitu transportasi berbasis jalan dan berbasis rel. Seluruh wilayah Kecamatan Kepanjen dihubungkan melalui sarana angkutan darat sehingga jalan merupakan prasarana transportasi yang utama. Kecamatan Kepanjen memiliki terminal yang tersedia yaitu terminal Talangagung yang dimana merupakan terminal tipe C. Letak lokasi terminal ini di Jalan Raya Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Terminal Talangagung melayani moda transportasi Angkutan Desa (Angdes). Trayek angkutan umum pedesaan yang tersedia 6 trayek yang masih aktif dan biasanya angkutan umum ini beroperasi pada terminal bayangan di kawasan CBD Pasar Kepanjen.

Kondisi eksisting terminal yang sudah tidak aktif dan angkutan pedesaan yang melintasi Kecamatan Kepanjen memiliki jadwal operasi yang tidak teratur dan menjadikan CBD Kecamatan Kepanjen sebagai terminal bayangan, sehingga tidak ada kendaraan angkutan umum yang keluar masuk terminal. Sedangkan untuk angkutan tidak dalam trayek diantaranya ojek pangkalan, ojek online, dan becak. Kondisi transportasi pada Kecamatan Kepanjen belum berkembang pesat karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan mobilitas kesuatu tempat.

2.1.1 Kondisi Lalu Lintas di Kepanjen

Kecamatan Kepanjen dihubungkan melalui sarana angkutan darat sehingga jalan merupakan sarana angkutan utama. Dari tahun ke tahun perkembangan pengguna jalan/ jumlah kendaraan terus meningkat sehingga pemerintah terus-menerus melakukan pembenahan sarana dan prasarana jalan untuk melancarkan semua kegiatan dan mempermudah mobilitas penduduknya (BPS Kabupaten Malang, 2023). Kecamatan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan merupakan kota satelit utama menjadikan banyak aktivitas yang terjadi di wilayah internal (CBD) membuat tingginya pergerakan internal-internal di Kepanjen. Aktivitas masyarakat di Kepanjen sangat di pengaruhi oleh pusat pemerintahan dan pusat kegiatan oleh kondisi guna lahan, di Kecamatan Kepanjen guna lahan mendominasi adalah guna lahan pertanian (kebun tebu dan sawah) menjadikan sektor ini sebagai pendapatan domestic dan sebagai tumpuan utama pembangunan ekonomi masyarakat sehingga membuat tingginya aktivitas sektor komoditi tebu dan padi. Hal ini akan berdampak pada perjalanan angkutan barang dalam distribusi produksi komoditi tersebut. Distribusi angkutan barang masuk dan menuju Kepanjen membuat pola pergerakan lalu lintas eksternal-internal maupun sebaliknya serta tingginya perjalanan eksternal-eksternal yang ada di Kepanjen. Dengan dukungan perkembangan sektor industri menjadikan lalu lintas angkutan barang menjadi meningkat dan membebani jaringan jalan terutama banyaknya kendaraan berat yang melintasi jaringan jalan utama Kepanjen untuk tujuan perjalanan distribusi barang. Dengan tipe pola pergerakan yang ada di Kepanjen menjadikan Kepanjen memiliki pola perjalanan *mix traffic*.



Gambar 2.2 Kondisi Lalu Lintas *Mix Traffic* di Kepanjen

Gambar diatas menunjukkan kondisi lalu lintas *mix traffic* di Kepanjen, hal ini mengakibatkan kemacetan di Kawasan perkotaan dan berdampak pada lamanya waktu perjalanan, sehingga biaya perjalanan akan menjadi meningkat. Kondisi ini di akibatnya tinggi nya volume lalu lintas di seluruh penjuru wilayah penyangga Kepanjen yang memiliki karkakteristik perjalanan eksternal – eksternal.

2.1.2 Jaringan Jalan di Kepanjen

Pembangunan jalan baik secara kuantitas (panjang jalan) maupun kualitas (kondisi jalan) yang memadai sangat dibutuhkan pengguna jalan. Dengan sistem jaringan yang ada di Kecamatan Kepanjen, maka akan mempengaruhi sistem kegiatan dengan adanya aktivitas perjalanan pengguna sarana dan prasarana transportasi. Seiring dengan semakin meningkatkan pembangunan jalan yang terbagi atas jalan negara jalan propinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 1.878,84 Km, terbagi atas jalan negara sepanjang 152,24 Km, jalan propinsi sepanjang 69,71 km dan jalan Kabupaten 1.668,76 km (BPS Kabupaten Malang, 2023).

Sistem jaringan jalan di Kepanjen yang terletak pada jaringan jalan regional. Jaringan jalan di Kepanjen terbagi menjadi jaringan jalan utama internal dan eksternal. Jalan Utama Internal Jaringan jalan di Kecamatan Kepanjen cenderung membentuk pola semi grid dan Jaringan Jalan Utama Ekternal adalah Jaringan jalan yang merupakan akses eksternal mempunyai pola jaringan linier dan yang termasuk dalam jaringan jalan utama eksternal hal ini mempengaruhi

pergerakan (internal – eksternal) dan (eksternal – eksternal). Kabupaten Malang bertumpu pada satu Jalan utama yaitu Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas jalan yang menghubungkan Kepanjen – batas Kota Malang (13,23 km), Kepanjen – batas Kab. Blitar (17,04 km), dan Kepanjen – Gondanglegi (8,50 km), jalan ini penghubung jalan lintas menuju kawasan CBD di Kepanjen (*Kementerian PUPR*, 2022). Jaringan jalan sekunder yaitu jalan Kolektor primer terdapat sebanyak tiga ruas yang menghubungkan 6 akses kordon luar. Jaringan jalan di Kepanjen secara alamiah terbatas oleh 2 sungai besar (Metro dan Brantas) yang membentang dari utara ke selatan di sisi barat dan timur wilayahnya, untuk menuju wilayah ini terdapat 6 akses jalan utama dari 3 penjuru wilayah.

Ruas jalan yang memiliki perkembangan penggunaan lahan paling banyak di Kecamatan Kepanjen ini adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, Jalan Kawi, Jalan Panji yang merupakan jalan Arteri Primer dengan lebar jalan efektif 8 m terdiri dari 2 lajur 2 arah tanpa median (2/2-TT). Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Panji sebagai jalan kolektor primer berfungsi untuk menghubungkan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Kota Malang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sedangkan Jalan Sultan Agung-Jalan Kawi merupakan jalan Arteri Primer yang berfungsi untuk menghubungkan Kepanjen dengan Kabupaten Blitar yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) (Fi et al., 2023). Panjang ruas beserta fungsi dan status jalan di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Jaringan jalan utama di Kecamatan Kepanjen

AKSES KORDON LUAR	JARINGAN JALAN EKSTERNAL	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN	JARINGAN JALAN INTERNAL
1	BTS. KOTA MALANG - KEPANJEN	13,23	JAP	NASIONAL	JL. A. YANI
					JL. P. SUDIRMAN
					JL. RAYA MOJOSARI
2	KEPANJEN - GONDANGLEGI	8,5	JAP	NASIONAL	JL. PANJI
					JL. TRUNOJOYO
3	BTS. KAB. BLITAR - KEPANJEN	17,04	JAP	NASIONAL	JL. JATIKERTO
					JL. KAWI
					JL. TALANGAGUNG

AKSES KORDON LUAR	JARINGAN JALAN EKSTERNAL	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN	JARINGAN JALAN INTERNAL
4	KEPANJEN -	11,78	JKP	KABUPATEN	JL. SULTAN AGUNG
	KENDALPAYAK				JL. PANARUKAN
	(JL. RAYA SUKORAHARJO)				JL. BANGSRI
5	KEPANJEN -	16,10	JKP	KABUPATEN	JL. SUMEDANG
	PAGAK (JL. SUMEDANG)				JL. JENGGOLO
6	TALANGAGUNG NGAJUM	4,50	JKP	KABUPATEN	JL. RAYA GUNUNG KAWI

Sumber: (Kementerian PUPR, 2022)

2.2 Kondisi Wilayah Kajian

2.2.1 Jalan Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen

Jalibar atau Jalan Lingkar Barat, menjadi sebuah jalan yang begitu akrab bagi pengguna jalan di Malang yang ingin pergi ke Blitar. Jalan yang baru diresmikan pada tahun 2013 lalu itu di prediksi bisa menghemat waktu perjalanan hingga 30 menit dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Kepanjen. Pembangunan Jalan Lingkar Barat di Kepanjen ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 ini telah selesai pengerjaannya secara keseluruhan pada akhir tahun 2011 dan telah dibuka atau dilewati arus lalu lintas. Tetapi, jalan sejauh lima kilometer itu kini sudah bisa dinikmati oleh semua orang. Ada dua Jalan di jalan yang melewati dua desa yaitu desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung itu. Jalan yang besar dan terbilang baru tersebut merupakan sebuah rencana untuk mengembangkan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Jalan Lingkar Barat ini memiliki fungsi Jalan Kolektor Primer mempunyai panjang 4,53 meter dengan lebar total 26 meter dengan tipe jalan 4 lajur 2 arah terbagi (4/2-T) terbentang dari Kecamatan Kepanjen hingga Kecamatan Ngajum yang melewati dua desa yaitu Desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung. Selama 10 tahun lebih di operasikan Jalan Lingkar Barat ini belum memberikan *insight* untuk perkembangan kawasan yang berada di sepanjang ruas jalan ini. Hal ini karena masih sepi dan sedikit kendaraan yang menggunakan akses jalan ini untuk

mobilitas perjalanan eksternal-eksternal. Kondisi di lapangan memperlihatkan gambaran eksisting Jalan Lingkar Barat di bawah ini:



Gambar 2.3 Kondisi Eksisting Ruas Jalan Lingkar Barat Kepanjen

Jalibar merupakan akses langsung penghubung pergerakan dari zona eksternal Kecamatan Ngajum - Batas Kota Malang dengan kondisi tahun dasar rendahnya nisbah volume kendaraan di bandingkan kapasitas jalan di anggap belum efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan *mix traffic*. Hal ini dikarenakan kepentingan pelaku perjalanan yang membebani ruas jalan utama tidak hanya perjalanan yang berasal eksternal Kecamatan Ngajum – Batas Kota Malang karena masih ada rute alternatif dengan panjang lintasan lebih pendek untuk aksesibilitas perjalanan. Selain itu tidak semua pelaku perjalanan Batas Kab. Blitar - Batas Kota Malang yang ingin memanfaatkan Jalan Lingkar Barat. Banyaknya pergerakan *mix traffic* juga di dominasi pergerakan Batas Kota Malang – Kecamatan Gondanglegi, Batas Kab. Blitar – Kecamatan Gondanglegi serta Kecamatan Pagak (Selatan) – Batas Kota Malang maupun sebaliknya. Aksesibilitas yang rendah membuat optimalnya akses Jalan Lingkar Barat, karena keterbatasan aksesibilitas dan interkoneksi maka pelaku perjalanan lebih memilih rute jalan utama Arteri Primer yang memasuki zona internal CBD Kepanjen, sehingga tidak efisien dalam menekan waktu perjalanan dan hal ini belum menjadi solusi serta akan tetap memperburuk kinerja jaringan jalan utama tahun dasar dan di masa yang akan datang.

2.2.2 Pengembangan Jalan Lingkar Luar Kepanjen

Jalan Lingkar Luar di Kepanjen merupakan pengembangan Jalan Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen. Pengembangan jalan lingkar luar ini sebagai Langkah

solutif dan juga rencana strategis dari Pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi lalu lintas *mix traffic* yang terjadi di Kepanjen. Rencana pengembangan Pembangunan Jalan Lingkar Barat menjadi Jalan Lingkar Luar diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kepanjen Tahun 2014-2034. Di bagian kedua terkait “Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pergerakan dan prasarana jaringan jalan serta selaras dengan sistem pelayanan angkutan umum” untuk rencana pengembangan jalan kolektor primer meliputi Jalan Ligkar Barat, pengembangannya dimulai dari Desa Mojosari – Desa Ngadilangkung – Desa Talangagung, Jalan Lingkar Timur mulai dari Desa Jatirejoyoso – Desa Sukoharjo – Desa Panarukan – Desa Kedungpedaringan dan Jalan Lingkar Selatan (Metro II) meliputi Desa Kedungpedaringan – Desa Panggungrejo – Metro II – Desa Talangagung menjadi jalur pengembangan Jalan Lingkar Luar di Kepanjen (*Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, 2014*).

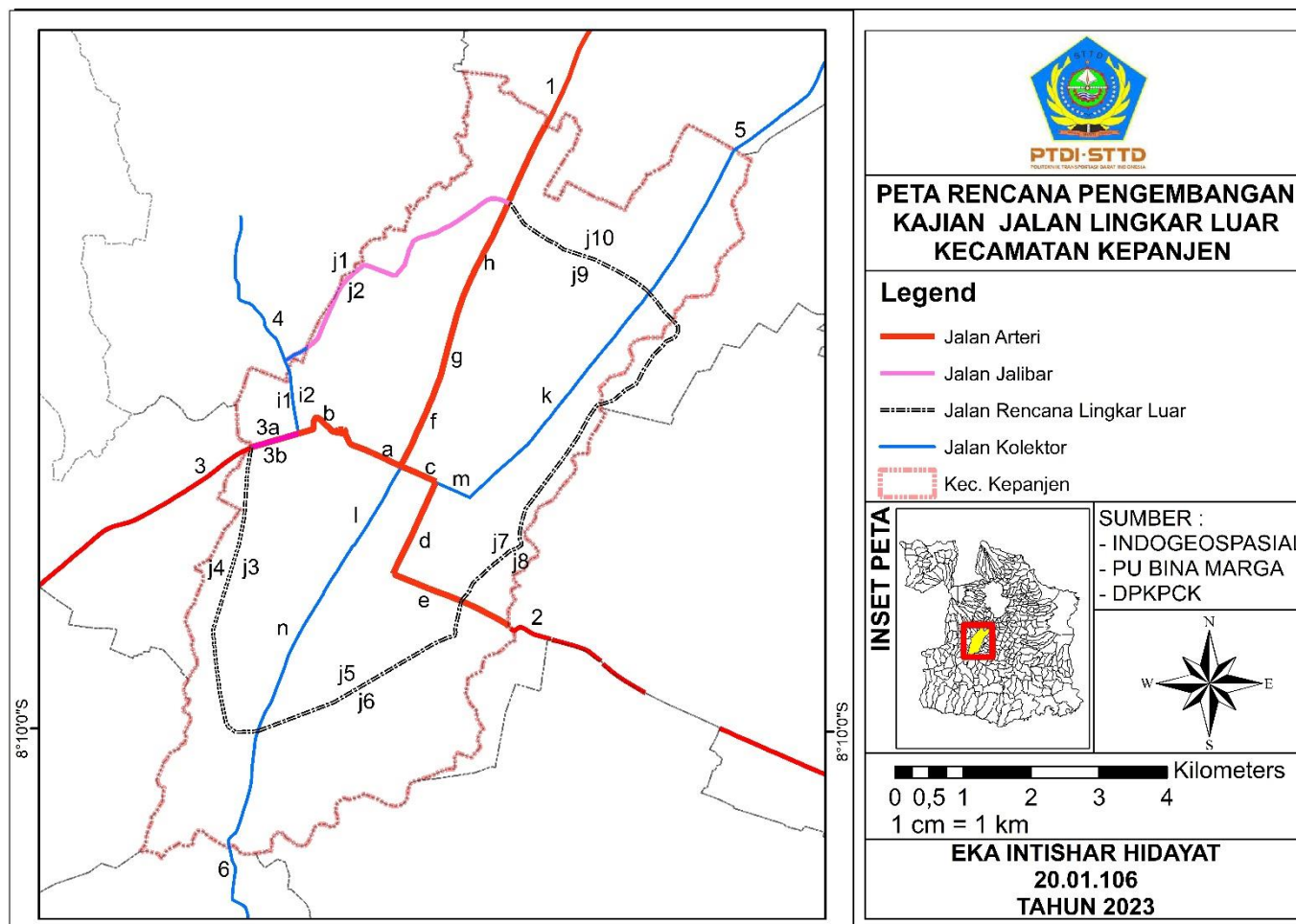
Pengembangan Jalan Lingkar Luar Kepanjen akan di operasikan mulai akhir tahun 2024 mendatang dengan trase rencana pengembangan jaringan jalan akan dibangun sepanjang $\pm 22,2$ km pada beberapa lahan baru yang mempunyai tata guna lahan persawahan/ lahan hijau perkebunan dan peningkatan jalan pada ruas jalan yang sudah ada. Berikut merupakan proporsi pembangunan jalan rencana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Proporsi Pembangunan Jalan Rencana

PROPORSI PEMBANGUNAN JALAN RENCANA			
JALAN LINGKAR KEPANJEN	Tipe Jalan	PANJANG JALAN (KM)	PERSENTASE (%)
JALAN PENGEMBANGAN	4/2-TT	17,68	79,6
JALAN EKSISTING	4/2-TT	4,53	20,4
TOTAL		22,2	100

Sumber: (PU Bina Marga, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat proporsi pembangunan jalan rencana dengan pembangunan jalan baru sepanjang 17,68 km (79,6%) dan tersambung dengan jaringan jalan eksisting Jalibar sepanjang 4,53 km (20,4%) dengan peningkatan jaringan jalan menjadi jalan lingkar yaitu Jl. Raya Jatikerto. Berdasarkan RDTR dan perencanaan pengembangan Jalan Lingkar Luar di Kecamatan Kepanjen di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Trase rencana pengembangan jaringan Jalan Lingkar Luar Kepanjen

2.2.2 Pembagian Zonasi Wilayah Kajian

Zonasi yang terdiri dari 6 zona internal (Kawasan CBD) dan 6 zona eksternal berdasarkan kecamatan serta penentuan centroid dilihat dari sistem kegiatan diasumsikan berlokasi pada titik tertentu dalam zona dan dapat dikatakan pusat zonanya yang diasumsikan menjadi tempat konsentrasi semua ciri pergerakan dari zona tersebut (Tamin, 2000). Pembagian zonasi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pembagian zonasi wilayah kajian.

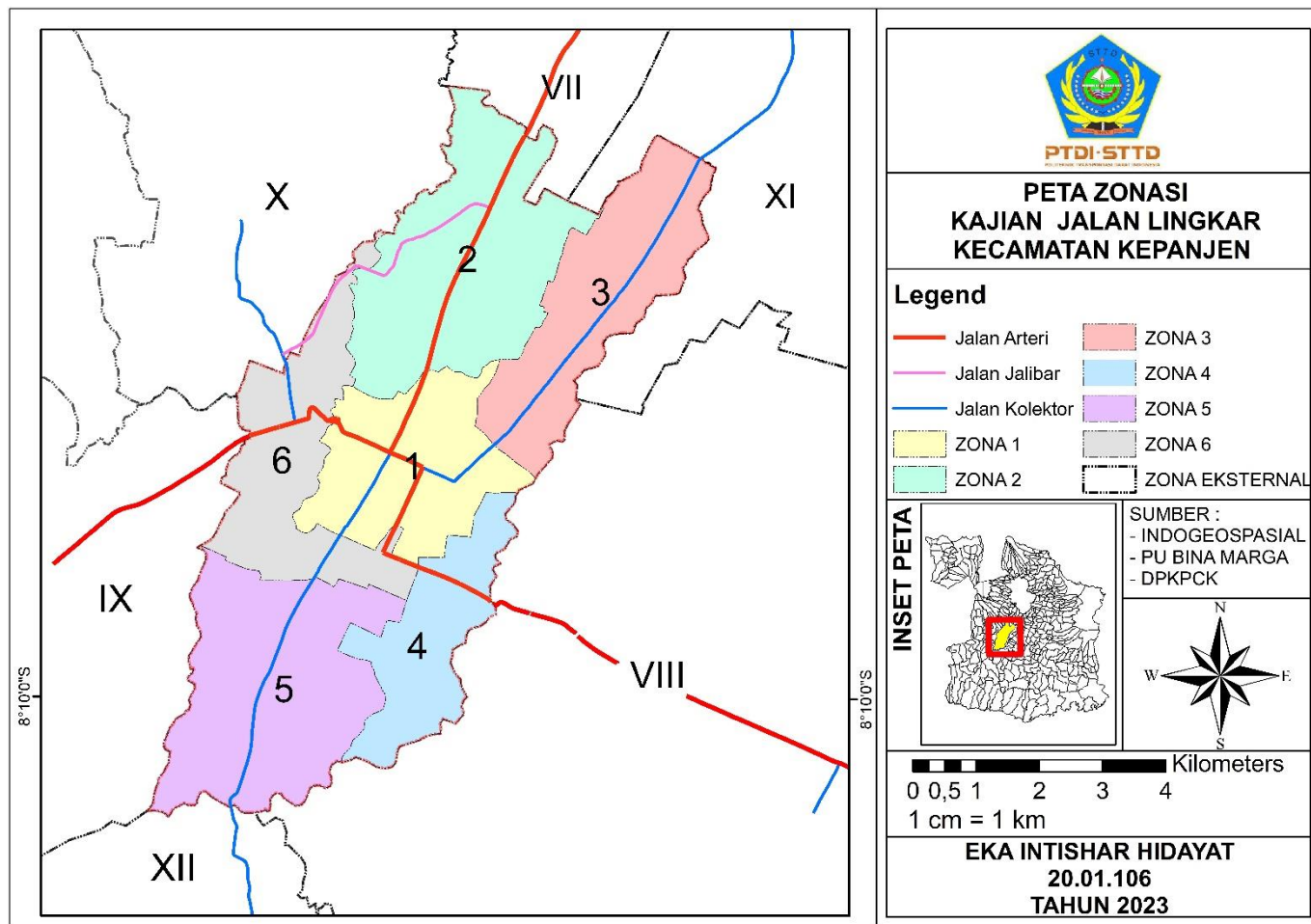
ZONA INTERNAL				
ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	GUNA LAHAN	KETERANGAN
1	KEPANJEN	KEL. KEPANJEN	PERKANTORAN	CBD
			PENDIDIKAN	
			PASAR	
			PERIBADATAN	
		KEL. PANARUKAN	KESEHATAN	
			PERDAGANGAN	
			PERMUKIMAN	
		KEL. ARDIREJO	PERKANTORAN	SUB PUSAT PELAYANAN
			PENDIDIKAN	
			PERMUKIMAN	
2	KEPANJEN	KEL. CEPOKOMULYO	PERKANTORAN	PERDAGANGAN
		DESA MOJOSARI	PERDAGANGAN	SUB PUSAT PELAYANAN DAN PERDAGANGAN
		DESA NGADILANGKUNG	PERDAGANGAN	
		DESA DILEM	PERDAGANGAN	
3	KEPANJEN	DESA JATIREJOYOSO	PERMUKIMAN	INDUSTRI DAN PERMUKIMAN
		DESA SUKORAHARJO	INDUSTRI	
		DESA CURUNGREJO	PENDIDIKAN	
			PERMUKIMAN	
4	KEPANJEN	DESA KEDUNG	PUSAT	PUSAT OLAHRAGA DAN PERTANIAN
		PEDARINGAN	OLAHRAGA	
		DESA TEGALASARI	PERTANIAN	
5	KEPANJEN	DESA MANGUNREJO	PERDAGANGAN	PERMUKIMAN DAN PERTANIAN
			PERTANIAN	
		DESA KEMIRI	PERTANIAN	
		DESA SENGGURUH	WISATA	

ZONA INTERNAL				
ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	GUNA LAHAN	KETERANGAN
6	KEPANJEN	DESA JENGGOLO	PERMUKIMAN	PERMUKIMAN
		DESA PANGGUNGREJO	PERMUKIMAN	
		DESA TALANGAGUNG	PERMUKIMAN	
ZONA EKSTERNAL				
ZONA	KECAMATAN	KOTA YANG DILEWATI	GUNA LAHAN DOMINAN	
7	PAKISAJI	KOTA MALANG	INDUSTRI	
			PERDAGANGAN	
8	GONDANGLEGI	KAB. LUMAJANG	PERTANIAN	
9	KROMENGAN	KAB. BLITAR	PERTANIAN	
10	NGAJUM	KEC. WONOSARI	PERTANIAN	
11	BULULAWANG	KOTA MALANG	INDUSTRI	
12	PAGAK	KEC. DONOMULYO	PERTANIAN	

Sumber: (PKL Kabupaten Malang, 2023)

Sistem jaringan jalan lingkaran Luar Kepanjen ini dibentuk untuk meningkatkan aksesibilitas dan interkoneksi di Kecamatan Kepanjen. Maksud pengembangan Jalur Lingkaran tersebut bertujuan untuk mengurangi beban jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dalam wilayah perkotaan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan sosial ekonomi di sekitarnya serta dapat mengalihkan pergerakan kendaraan dari zona eksternal akan menuju ke zona internal dan diharapkan seluruh pergerakan *through traffic* dapat melewati Jalur Lingkaran Luar Kepanjen terutama untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

Dalam pembagian zonasi di ambil dari beberapa Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kepanjen Tahun 2014-2034 untuk perencanaan pemodelan yang di lihat dari pergerakan arus lalu lintas kendaraan berdasarkan pembagian zona. Peta zonasi tersebut sebagai mode eksisting yang digunakan dalam simulasi pemodelan (VISUM) untuk pembebanan perjalanan yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.5 Peta zonasi Kecamatan Kepanjen